

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BUDI INTIDANA SENTOSA
TAHUN 2024**



**JALAN GAJAH MADA NO.85C KOTA BANDAR LAMPUNG
TELEPON: 0721 (8018074)**



PENJELASAN UMUM

Pada tahun 2024 PT. BPR Budi Intidana Sentosa (BPR BIS) yang sebelumnya bernama BPR Tunas Jaya Graha telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di dalam menjalankan setiap aspek kegiatan usahanya sehingga membawa perkembangan yang cukup positif dengan meningkatkan pertumbuhan kredit meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memenuhi kecukupan permodalan.

BPR Budi Intidana Sentosa memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK sehingga BPR BIS dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Provinsi Lampung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR BIS didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Tunas.

BPR BIS telah beroperasi lebih dari 15 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR BIS selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus BPR dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Tunas Jaya Graha akan terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.



LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT BPR BUDI INTIDANA SENTOSA
Alamat	JALAN GAJAH MADA NO.85C KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor Telepon	0721 (8018074)
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	2
Predikat Komposit	Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Yulius Kausar
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab penuh dalam kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR secara professional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur di AD/ ART BPR dan peraturan perundangan. c. Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, atau otoritas lainnya. d. Menerapkan tatakelola pada setiap kegiatan usaha BPR. e. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyediakan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	Maria Nilawaty
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab dan membantu Direktur Utama dalam kepengurusan BPR. b. Membantu Direktur Utama untuk mengelola BPR secara professional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur di AD/ ART BPR dan peraturan perundangan.. c. Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, atau otoritas lainnya.		



d.Menerapkan tatakelola pada setiap kegiatan usaha BPR. e.Memastikan pelaksanaan kegiatan operasional BPR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dan memastikan budaya kepatuhan pegawai terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain; g. Memastikan peningkatan kualitas SDM BPR dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
a. Penerapan Tata Kelola yang baik telah dilaksanakan secara konsisten. b. Menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. c. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum tanggal jatuh tempo. d. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing. e. Budaya Kepatuhan telah ditanamkan kepada seluruh pegawai. f. Monitoring dan penagihan kepada debitur macet dan menurunkan NPL telah dilaksanakan dengan baik. g. Pemenuhan realisasi target RBB 2024 telah dilaksanakan dengan cukup baik.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Direksi senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris serta menyediakan data dan informasi BPR secara akurat dan relevan kepada Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Jaskingto
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
a. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR. b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, OJK dan institusi lainnya. d. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. e. Dewan Komisaris wajib memberitahukan apabila terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK.			
2.	Nama	:	Oey Albert
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
a. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR. b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, OJK dan institusi lainnya. d. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. e. Dewan Komisaris wajib memberitahukan apabila terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK.			
Rekomendasi Kepada Direksi :			
a. Direksi Melakukan Penerapan Tata Kelola BPR secara konsisten.			



- b. Direksi wajib menerapkan proses Manajemen Risiko yang efektif dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. BPR.
- c. Direksi memastikan semua Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti sesuai komitmen.
- d. Direksi memastikan semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti
- e. Direksi senantiasa menanamkan Budaya Kepatuhan kepada seluruh pegawai.
- f. Direksi melakukan Monitoring dan penagihan kepada debitur macet dan menurunkan rasio NPL.
- g. Direksi melakukan Optimalisasi dan Pemenuhan target RBB 2023.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dewan komisaris senantiasa memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan strategis BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR tidak memiliki Komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-



2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR tidak memiliki Komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yulius Kausar	Rp0	0%
2.	Maria Nilawaty	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yulius Kausar	-	-	0%
2.	Maria Nilawaty	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yulius Kausar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada



2.	Maria Nilawaty	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan terhadap sesama anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yulius Kausar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Maria Nilawaty	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap sesama anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Jaskingto	Rp0	0%
2.	Oey Albert	Rp6.200.000.000	50%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Komisaris Utama memiliki kepemilikan saham pada BPR sebesar 50%			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Jaskingto	-	-	0%
2.	Oey Albert	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR



No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada anggota direksi dan pemegang saham lainnya.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada anggota direksi dan pemegang saham lainnya.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp454.920.000	2	Rp102.060.000
2.	Tunjangan	2	Rp40.738.440	2	Rp2.330.664
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp495.658.440		Rp104.390.664
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus BPR yaitu Direksi dan Komisaris berupa gaji pokok dan tunjangan pph pasal 21.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi mendapatkan fasilitas transportasi berupa mobil dinas sebanyak 2 unit untuk 2 orang dan juga mendapatkan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.47 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.12 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.36 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.56 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji Direksi tertinggi sebesar Rp. 20.070.000,- per bulan, Gaji Direksi terendah sebesar Rp. 17.840.000 per bulan. Gaji Dewan Komisaris sebesar Rp. 8.505.000,- per bulan. Sedangkan Gaji Pegawai Terendah sebesar Rp. 3.164.370 per bulan dan Gaji Pegawai Tertinggi Sebesar Rp. 7.838.831 per bulan.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	07 Maret 2024	7	1. Membahas Langkah-Langkah Strategis BPR 2. Membahas Ekspansi Kredit 3. Membahas Kredit Bermasalah, Macet dan Hapus Buku
2.	27 Juni 2024	18	1. Membahas Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023. 2. Membahas isu-isu strategis BPR. 3. Membahas Optimalisasi RBB Tahun 2023.



3.	03 Juni 2024	7	1. Membahas hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2024. 2. Membahas isu-isu strategis BPR. 3. Membahas Optimalisasi RBB Tahun 2024
4.	04 September 2024	7	1. Membahas Hasil Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2024 2. Membahas isu-isu strategis BPR.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris mengadakan rapat 4 kali dalam 1 tahun.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Jaskingto	4	0	100%
2.	Oey Albert	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris hadir rapat secara fisik 4 kali dalam setahun				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
BPR tidak terdapat Fraud (Zero Fraud)								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
BPR tidak terdapat permasalahan hukum d tahun 2024		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
BPR tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2024							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	16 Agustus 2024	Sosial	Sumbangan untuk kegiatan HUT RI ke 79 di Kelurahan Tanjung Baru RT 02 dan 04	Kelurahan Tanjung Baru	Rp100.000
2.	29 Februari 2024	Sosial	Bantuan Buku Perpustakaan Provinsi Lampung yang diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	Rp115.500
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
BPR memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial berupa Sumbangan untuk kegiatan sosial HUT RI ke 79 di Kelurahan Tanjung Baru untuk RT 02 dan 04 serta bantuan buku Perpustakaan Provinsi Lampung.					



Bandar Lampung, 29 Januari 2025

PT BPR BUDI INTIDANA SENTOSA

Disiapkan Oleh

Dany Afriandro A.P.
PE Kepatuhan, Menris, APPU-PPT

Disetujui Oleh

Yulius Kausar
Direktur Utama

Diketahui Oleh

Gaskinto
Komisaris